



# REKOMENDASI SIDANG KOMISI

SIMPOSIUM INTERNATIONAL XIV  
PPI DUNIA 2022

Direktorat Penelitian & Kajian  
PPI Dunia 2021/2022

## KATA PENGANTAR

Sejarah mencatat tanggal 25 Oktober 1908, *Indische Vereeniging* dibentuk sebagai asosiasi pelajar Hindia di Kota Leiden, Belanda. Pada tahun 1922, nama organisasi ini diubah menjadi atau Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dengan Muhammad Hatta sebagai salah satu pemimpin organisasi ini. Kemudian, pada tahun 2007, beberapa PPI Negara melakukan deklarasi untuk pembentukan Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia) pertama kali dan saat ini menjadi salah satu asosiasi terbesar di Indonesia yang beranggotakan 60 PPIN tersebar dari tiga Kawasan: Amerika-Eropa, Asia-Oseania, dan Timur Tengah-Afrika.

PPI Dunia Kabinet Cendekia Apik memiliki fokus kepada strategi dan pendekatan yang disebut strategi Penta Helix. Strategi ini akan berfokus pada pemerintah, universitas, industri, media, dan komunitas untuk berkolaborasi dalam mencapai satu tujuan besar bersama. Kolaborasi dari lima komponen ini menjadi sentral dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini, Direktorat Penelitian dan Kajian (Ditlitka) PPI Dunia memegang peranan penting karena berfokus pada kajian akademik dari berbagai pelajar Indonesia di luar negeri salah satunya adalah penyusunan rekomendasi untuk para stakeholder di Indonesia.

Dalam Simposium Internasional XIV tahun 2022, rekomendasi-rekomendasi telah dikaji secara mendalam oleh 11 komisi Ditlitka akan disampaikan langsung ke pemangku kebijakan di Indonesia. Beberapa poin penting dalam rekomendasi ini mengangkat isu kesetaraan gender, rantai pasok pangan, transformasi digital dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta perlindungan pelajar Indonesia. Besar harapan rekomendasi ini menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan melalui perubahan kebijakan dan tindakan-tindakan strategis.

### **Koordinator PPI Dunia 2021-2022**

FARUQ IBNUL HAQI, M.RgnlUrbPlan.

## KATA PENGANTAR

Pandemi Covid-19 mengakibatkan disrupsi global yang banyak merubah tatanan kehidupan dunia dari berbagai sektor. Direktorat Penelitian dan Kajian (Ditlitka) PPI Dunia Kabinet Cendekia Apik melihat kondisi ini menjadi isu sentral yang harus ditanggapi segera. Dengan berdasarkan pada dokumen United Nation Research Roadmap for the Covid-19, Sustainable Development Goals (SDGs), Rencana Pembangunan Jangan Menengah (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN), 11 Komisi dalam naungan Ditlitka berkolaborasi dengan 26 PPIN menghasilkan berbagai luaran-luaran kinerja yang hasilnya akan disampaikan ke pemerintah Indonesia sebagai bentuk nyata kontribusi pelajar Indonesia di luar negeri untuk bangsanya.

Luaran-luaran yang sudah dicapai di akhir kepengurusan ini berupa empat seri buku dengan tema **Indonesia Post Pandemic Recovery** dengan empat tema utama: *Social Perspective, rethinking health and Economics, Environment and Technology Role for Indonesian Development, dan Strategy Towards Net-Zero Emission by 2060 from the Renewables and Carbon-Neutral Energy Prespective*. Selain itu, setiap komisi juga telah menganalisa kebijakan dan aturan pemerintah yang dituangkan dalam dokumen *policy brief*. Dokumen *policy brief* ini telah disampaikan ke publik melalui kegiatan diseminasi dengan mengundang tokoh yang telah memberikan pandangan terhadap dokumen yang telah disusun. Sebagai bentuk diseminasi kepada masyarakat luas, berbagai komisi juga telah menulis opini-opini akademik dan tulisan populer di berbagai media masa nasional dan internasional. Ditlitka PPI Dunia juga berperan dalam menanggapi isu RUU kekerasan seksual yang banyak mendapat perhatian masyarakat melalui dokumen kajian akademik dan surat pernyataan sikap. Permasalahan Pelajar Indonesia di Luar Negeri ditanggapi dengan menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan naskah akademik sebagai dasar penyusunan RUU Perlindungan Pelajar.

Dokumen rekomendasi ini merupakan bentuk benang merah dari seluruh luaran yang telah dilaksanakan oleh Ditlitka. Poin-poin rekomendasi ini merupakan intisari yang akan menjadi luaran Simposium Internasional XIV PPI Dunia dan akan disampaikan secara langsung ke pemangku kebijakan di Indonesia bersama dengan seluruh produk Ditlitka. Akhirnya, pemikiran dan analisis peserta Sidang Komisi dengan mempertimbangkan dasar kajian yang matang menjadi fase yang penting untuk menyempurnakan rekomendasi ini. Selamat mengikuti Simposium Internasional XIV.

### **Direktorat Penelitian dan Kajian**

Muhammad Aswin Rangkuti (Direktur Penelitian dan Kajian)

Radityo Pangestu (Wakil Direktur Bidang Khusus)

Anthony Sunjaya (Wakil Direktur Bidang Kesehatan dan Ekonomi)

Afifah Muharikah (Wakil Direktur Bidang Ilmu Sosial)

David Silalahi (Wakil Direktur Bidang Teknologi dan Lingkungan Hidup)



## DAFTAR SIDANG KOMISI SIMPOSIUM INTERNATIONAL XVI PPI DUNIA 2022

### KATA PENGANTAR

### RESUME REKOMENDASI KOMISI

- A. Tim Kajian Perlindungan Pelajar
- B. Komisi Timur Tengah
- C. Komisi Kesehatan
- D. Komisi Ekonomi
- E. Komisi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- F. Komisi Pendidikan
- G. Komisi Hubungan International
- H. Komisi Perlindungan Sosial dan Kebudayaan
- I. Komisi Lingkungan Hidup
- J. Komisi Energi
- K. Komisi Teknologi, Informasi dan Komunikas Publik



## RESUME REKOMENDASI KOMISI

### A. Tim Kajian Perlindungan Pelajar

Tim Kajian Perlindungan Pelajar melalui penelitian hukum normatif dengan dukungan data-data kualitatif dan kuantitatif melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri atau disingkat RUU PP. Dengan tujuan untuk melakukan basis penyusunan gagasan pengaturan materi RUU PP terkait asas, prinsip dan urgensi pengaturan RUU PP yang digunakan sebagai landasan penerbitan Undang-Undang Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri. Naskah Akademik RUU PP dapat diakses melalui laman berikut ini : <https://s.id/NaskahAkademikRUUPP>.

### B. Komisi Timur Tengah

Komisi Kajian Timur-Tengah PPI Dunia periode 2021/2022 melalui kajian yang telah dilakukan oleh para penulis buku *Cakrawala Dunia Arab (Paradigma Holistik Relasi Politik, Agama dan Budaya di Timur Tengah dan Afrika Utara)* serta dari *Policy Brief: Mahasiswa Indonesia di Mesir Membludak Bagaimana Pemerintah Perlu Mengatasinya?* Sebagai salah satu upaya mahasiswa Indonesia dari berbagai belahan dunia dalam memberikan sumbangsih ide dan gagasan yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan penting bagi pemerintah Indonesia dalam upaya memangun pondasi kajian Timur-Tengah yang komprehensif serta menjadi jembatan hubungan bagi pemerintah Indonesia dengan negara-negara di Timur-Tengah.

1. Perlu adanya regulasi yang disepakati bersama oleh pihak PPMI Mesir dengan pemerintah terkait pengiriman mahasiswa baru ke Mesir untuk mengantisipasi semakin membludaknya jumlah mahasiswa Indonesia yang berakibat semakin kompleksnya permasalahan sosial yang dihadapi pelajar Indonesia di negara tersebut. Hal ini juga penting untuk menjaga kualitas lulusan Indonesia di Mesir.
2. Mendorong langkah pemerintah untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel serta mendorong implementasi dialog dengan *rights-based approach* bagi pihak Palestina dan Israel. Indonesia juga dapat berperan aktif untuk mendorong negara-negara yang belum mengakui kedaulatan negara Palestina untuk segera mengakui kedaulatannya.
3. Menelaah kembali konsep Wasatiah Islam dalam mewujudkan perdamaian yang sesuai dengan realitas dan idealitas masyarakat Indonesia.
4. Menjauhkan masyarakat dari berita serta penafsiran ayat-ayat hoaks demi membangun kerukunan masyarakat beragama di Indonesia.
5. Indonesia dapat memfasilitasi lebih baik lagi bagi para pengungsi Rohingya serta mendorong pemerintah Myanmar agar segera menyelesaikan secara tuntas konflik internal mereka demi menjaga stabilitas sosial negara-negara ASEAN.
6. Mendorong para pegiat serta mahasiswa Bahasa Arab untuk lebih mengisi peran dalam Era Globalisasi baik dalam bidang Pendidikan, Filologi, Terjemahan, Seni dll. demi menghidupkan kemajuan umat Islam di Tanah Air.

### C. Komisi Kesehatan

Komisi Kesehatan memberikan 10 (sepuluh) isu besar yang menjadi perhatian, meliputi:

1. Penggunaan *evidence-based analysis* dalam menentukan kebijakan kesehatan di Indonesia
2. Pengembangan platform *telemedicine* yang integratif antara fasilitas kesehatan, dinas kesehatan, dan pengguna guna meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan dan kewaspadaan pandemi;
3. Pembangunan kerjasama antar institusi akademik, kesehatan, dan pemerintah untuk mengembangkan platform *telemedicine* dan terobosan-terobosan kesehatan lainnya;
4. Pembuatan rekomendasi pemenuhan nutrisi untuk masyarakat, khususnya di daerah rawan pangan, dan penentuan pagu harga untuk menjamin afordabilitas makanan pokok;
5. Meningkatkan literasi dan deteksi dini gangguan kesehatan mental, terutama pada lingkungan sekolah, kerja, dan pekerja kesehatan;
6. Meningkatkan jangkauan dan kontinuitas pelayanan kesehatan mental melalui *telemedicine* dan kebijakan promotif preventif di komunitas;
7. Meningkatkan investasi dan akses untuk dana riset kesehatan;
8. Memeratakan fasilitas dan sumber daya riset kesehatan ke seluruh Indonesia;
9. Membangun koalisi *biodefense* dan *biosecurity* antar negara dalam platform G20, dengan dipelopori oleh Indonesia;
10. Membangun rantai pengembangan riset dan pelatihan sumber daya laboratorium, terutama untuk negara-negara selatan dan negara berkembang.

Sejumlah rekomendasi tersebut bersumber dari 4 (empat) tulisan dalam buku Indonesia Emas Berkelanjutan 2045 seri ekonomi, kesehatan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif; yang merujuk pada *SDGs Goal 3* yang poinnya mendorong negara-negara untuk meningkatkan kerjasama dengan satu sama lain untuk mencapai tujuan-tujuan *SDGs*; serta berdasarkan *Policy Brief* dari Komisi Kesehatan PPI Dunia untuk Task Force 6 (Global Health Security & Covid-19), T20 Indonesia. Secara garis besar, kami menyepakati bahwa pemerintah perlu membangun infrastruktur-infrastruktur berbasis digital demi meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan, nutrisi, kesehatan mental, serta menjembatani jarak antara riset, pelayanan kesehatan, dan pembuatan kebijakan; mengadopsi pendekatan *evidence-based* dalam membuat kebijakan-kebijakan kesehatan, dengan bercermin pada contoh-contoh kasus nyata dari dalam dan luar negeri; serta menjadi pelopor dan pemimpin melalui platform G20 dalam membangun koalisi internasional, yang inklusif untuk negara-negara berkembang dan selatan, dalam memperkuat keamanan dan pertahanan biologi internasional, serta membangun pemerataan riset kesehatan dan kewaspadaan terhadap penyakit baru (*emerging disease*) di seluruh dunia.

### **Rekomendasi untuk kepengurusan mendatang :**

Komisi Kesehatan di kepengurusan mendatang untuk meningkatkan fokus pada *telemedicine* dan pembangunan platform kesehatan, mempertahankan peran Indonesia sebagai pelopor inovasi kesehatan terutama untuk negara-negara berkembang dan *global south*, dan mendorong pemerataan fasilitas pelayanan dan riset medis ke seluruh Indonesia. Selain itu, sebagai bahan masukan, forum meminta Komisi Kesehatan agar meningkatkan kerjasama pada *stakeholder* untuk mewujudkan rekomendasi-rekomendasi di atas dalam bentuk nyata.

### **D. Komisi Ekonomi**

Komisi Ekonomi PPI Dunia periode 2021/2022 melalui kajian yang telah dilakukan oleh para penulis buku "*Re-thinking Health and Economics Post COVID-19*" dan *Policy Brief* yang berjudul "Pasar Modal: Penguatan Domestik Investor dalam Menghadapi Potensi Krisis dan Pemulihan UMKM", telah menyampaikan rekomendasi dalam upaya penyampaian ide dan gagasan sehubungan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam membuat peraturan.

#### **Rekomendasi yang dapat disampaikan, diantaranya sebagai berikut:**

1. Penguatan investor domestik dalam rangka menghadapi potensi krisis melalui peningkatan literasi keuangan dan perluasan basis investor domestik dengan adanya investasi ritel sebagai alternatif pilihan investasi.
2. Dalam rangka pemulihan UMKM, perlu melakukan pendampingan intensif terhadap UMKM dalam mencari sumber pendanaan, khususnya melalui pasar modal (*Securities Crowdfunding, SCF*) serta meningkatkan pengawasan terhadap *financial technology* (fintech).
3. Dengan semakin maraknya utilisasi keuangan digital, terutama pada saat Pandemi COVID-19, menjadikan digitalisasi merupakan hal yang penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya penguatan dalam standar keamanan dalam industri *fintech*, menciptakan ekosistem regulasi yang adaptif dan seimbang, dan sosialisasi dan edukasi *fintech* secara berkelanjutan.
4. Terkait dengan kebijakan fiskal, rencana pengimplementasian *Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy* menjadi langkah penting bagi Indonesia. Selain mengatasi permasalahan pemajakan digital ekonomi dan mengatasi permasalahan penghindaran pajak, kebijakan ini juga diekspektasikan memberikan tambahan penerimaan negara yang akan menunjang program pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca dihantam kondisi COVID-19. Namun demikian, hal yang perlu menjadi perhatian sebelum konsensus bersama atas kebijakan ini tercapai adalah perihal atribut-atribut kebijakan seperti *profit residual threshold*, *reallocation percentage*, dan *revenue threshold*. Atribut tersebut perlu menjadi perhatian ketika Indonesia menyampaikan pandangannya atas kebijakan ini dalam forum *Inclusive Framework*.



5. Dalam rangka mengakselerasi penerbitan obligasi hijau (*green bond*) di Indonesia, perlu adanya peningkatan kesadaran pasar mengenai peran penting obligasi hijau, yang dapat dicapai dengan sinergitas tiga pemain kunci: Pertama, Otoritas yang berwenang dalam regulasi jasa keuangan dengan menerapkan strategi pemberian atau pencabutan insentif bagi industri jasa keuangan; Kedua, pelaku industri jasa keuangan wajib memiliki kesadaran tentang risiko krisis iklim dan peran obligasi hijau, serta yang ketiga Pemerintah sebagai katalis dalam perkembangan obligasi hijau dengan memanfaatkan kebijakan fiskal semisal insentif pajak.
6. Indonesia, sebagai bagian dari the *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), perlu mempertimbang untuk bergabung dalam *Global Value Chain* (GVC) guna memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global, terutama dalam hal ekspor dan impor, dimana GVC memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan produksi mereka berdasarkan value produksi terbaik dari suatu negara
7. Masih berhubungan dengan GVC, khususnya terkait dengan perdagangan internasional (*international trade*), pertama, Indonesia perlu untuk menerapkan strategi rantai pasokan global untuk perusahaan besar (multi-nasional) untuk meningkatkan pangsa pasar dan daya saing produk dalam negeri di seluruh dunia serta reformasi birokrasi memberikan pelayanan prima yang dapat mendorong terjadinya transaksi perdagangan internasional yang efisien.

#### **Rekomendasi untuk Organisasi PPI Dunia :**

1. Perbaiki jalur komunikasi internal PPI Dunia, karena saat ini terdapat beberapa media (WhatsApp, Telegram) sehingga terlalu banyak informasi dan menimbulkan kebingungan.
2. Selain SK tertulis dibutuhkan back up artikel dengan topik terkait apabila penulis internal/penulis luar tidak menyelesaikan tulisannya
3. Mekanisme *reward* and *punishment* dapat diterapkan sebagai bahan perhatian untuk meningkatkan komitmen penulis. Misalnya akan menjadi catatan kedepannya atau pertimbangan PPI Dunia bagi penulis yang tidak menyelesaikan tulisan/meninggalkan tanggung jawab untuk keikutsertaan.
4. Dapat menjadi pertimbangan PPI Dunia untuk meningkatkan komitmen keanggotaan. Bagi anggota yang meninggalkan tanggung jawab keanggotaan apabila mengikuti keanggotaan selanjutnya atau kegiatan lainnya di PPI Dunia sebagai bahan perhatian.

#### **E. Komisi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Pariwisata telah lama berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, pendapatan, dan devisa Indonesia. Sejumlah program kampanye untuk mempromosikan keindahan Indonesia seperti “Visit Indonesia”, dan “Wonderful Indonesia” terbukti telah berhasil menarik jutaan wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata serta menggiatkan roda ekonomi kreatif. Namun, pembatasan mobilisasi yang harus dilakukan selama masa pandemik membuat kondisi industri pariwisata dan ekonomi kreatif mengalami kemunduran bahkan stagnasi yang cukup lama. Mengingat hal ini,



Komisi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif PPI Dunia memberikan rekomendasi pada pemerintah Indonesia berdasarkan perubahan dan perkembangan terkini yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air.

Berikut adalah rekomendasi yang dipandang memiliki urgensi terkait kondisi terkini yang kami kelompokkan menjadi rekomendasi untuk sektor pariwisata dan industri ekonomi kreatif.

**1. Rekomendasi untuk sektor pariwisata:**

- 1.a Mendorong pemerintah untuk terus memperlebar jaringan, kerjasama, dan kolaborasi dengan berbagai pihak baik dalam scope lokal, nasional, dan global untuk menggiatkan dan memfasilitasi aktivitas ekonomi dan promosi pariwisata setempat.
- 1.b Merekomendasikan pemerintah untuk mengeksplorasi peluang pariwisata virtual untuk mendatangkan pendapatan dan meningkatkan kesadaran akan tempat-tempat wisata baru untuk dikunjungi orang setelah industri pariwisata pulih;
- 1.c Pentingnya Pemerintah Indonesia untuk senantiasa memperhatikan segala bentuk disrupsi yang terjadi baik dalam skala nasional, regional, maupun global. Hal ini menjadi sangat penting mengingat sektor pariwisata sangat sensitif terhadap segala bentuk perubahan ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi yang akan berdampak pada jumlah visitasi ke destinasi wisata;

**2. Rekomendasi untuk industri ekonomi kreatif:**

- 2.a Untuk memajukan ekonomi kreatif di Indonesia secara fundamental, dibutuhkan artikulasi sistem pendidikan dimulai dari sekolah, universitas, penyedia training/sertifikasi, dan pemasok bakat yang mampu menghubungkan keterampilan dengan kebutuhan industri;
- 2.b Penyediaan insentif fiskal dan pendanaan untuk pembinaan Penelitian dan Pengembangan di industri kreatif;
- 2.c Perlindungan yang kuat terhadap kekayaan intelektual, penyediaan hak cipta, dan tindakan cepat dalam penanganan pelanggaran;
- 2.d Inklusifitas teknologi pembayaran dan keuangan sampai kepada industri mikro dan kecil;
- 2.e Ekosistem pendukung berupa kolaborasi antara pemerintah lokal, pelaku ekraf, universitas, dan supplier local, termasuk dukungan untuk capacity building untuk pelaku ekonomi kreatif;

**F. Komisi Pendidikan**

Fokus utama rekomendasi yang disusun oleh Komisi Pendidikan adalah upaya pemulihan dan peningkatan kualitas SDM Indonesia pasca pandemi COVID-19. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil kajian pengurus komisi dan kontributor eksternal yang ditulis dalam beberapa bentuk publikasi.



### Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekat-sekat antara sekolah kejuruan, umum dan agama semakin tipis. Semuanya saling terhubung, sekolah butuh industri dan sebaliknya industri butuh sekolah—untuk tidak mengatakan hanya sekolah saja yang membutuhkan industri. Fenomena ini disambut dengan hadirnya Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Madrasah membuka program keterampilan hingga *Matching Fund* antara lembaga perguruan tinggi dan pihak industri. Hal ini menjadi jembatan sinergitas dan menciptakan karya nyata termasuk mendukung gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang merupakan suatu gerakan nasional yang digagas langsung oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mendukung produksi dalam negeri.
2. Sistem pendidikan harus terhubung dan adaptif dengan kebutuhan riil di lapangan. Sederhanyanya, kelak siswa yang sudah lulus memiliki kompetensi dan kemerdekaan dalam menentukan pilihannya untuk bekerja, melanjutkan studi atau berwirausaha. Tentu saja, kekhasan dari masing-masing satuan pendidikan harus diarusutamakan.
3. Kurikulum harus di-*refresh*. Bukan berarti kurikulum yang lalu/saat ini keliru, namun inilah kebutuhan zaman yang bergerak dinamis. Ibarat tangga, setiap kurikulum yang sudah disusun memiliki peran vital dalam menapaki langkah hingga sampai ke lantai berikutnya. Kurikulum kedepan harus mampu menjadikan anak cakap secara kompetensi dan spiritual. Dengan jalan meningkatkan skil siswa (*soft-skill* dan *hard-skill*), holistik, agile, adaptif, multi-disiplin dan menghargai kearifan lokal (*local wisdom*).
4. Digitalisasi perlu dioptimalkan. Salah satu hal yang dipelajari selama pandemi ini, para guru dan siswa semakin akrab dengan dunia digital. Ada praktik baik yang selama ini hanya muncul secara teori untuk memanfaatkan teknologi secara masif namun pada faktanya nihil penerapannya. Proses belajar tidak melulu hanya di dalam kelas dan bersumber dari guru. Siswa bisa belajar secara mandiri dan lebih luas melalui perangkat smartphone atau laptop yang terhubung dengan internet. Materi yang dipelajaripun sangat beragam, sumbernya banyak serta fleksibel.
5. Sinergitas antar-unit, lembaga, kementerian hingga kepala daerah menjadi hal yang tak bisa dielakkan. Beban dan puncak keberhasilan pendidikan bukan hanya ada di meja Kemendikbudristek melainkan peran kolaboatif-partisipatif dari seluruh pihak yang saling terkait. Karena tugas mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggungjawab kita semua.

### G. Komisi Hubungan International

Komisi Hubungan Internasional PPI Dunia memberikan rekomendasi pada pemerintah Indonesia berdasarkan perubahan dan perkembangan teranyar politik global. Rekomendasi dibuat setelah melalui proses kajian yang dilakukan oleh anggota Komisi Hubungan Internasional serta mempertimbangkan masukan dari pihak eksternal mengenai kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Dalam Menyusun rekomendasi ini, Komisi Hubungan Internasional juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Indonesia serta

situasi global yang senantiasa mengalami perubahan. Diantara perubahan dan perkembangan tersebut utamanya terkait dengan *recovery* pasca pandemi COVID-19, perubahan iklim dunia, politik di kawasan Asia dan Pasifik, dan konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia. Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan citra Indonesia di kawasan maupun dunia internasional sebagai sebuah *middle power*. Selain poin-poin rekomendasi ini, Komisi Hubungan Internasional menekankan pada pentingnya Pemerintah Indonesia untuk senantiasa berkomitmen mengambil kebijakan luar negeri yang sesuai dengan prinsip bebas aktif dan amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kami berharap rekomendasi tersebut dapat dipertimbangkan dan memiliki dampak positif pada kebijakan luar negeri Indonesia untuk periode mendatang.

1. Memastikan *democratic based decision-making* yang melibatkan berbagai aktor terutama komunitas epistemik didalam prosesnya dan dibarengi dengan penerbitan Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Indonesia.
2. Prioritas *high level diplomacy* dan *public diplomacy* untuk meningkatkan status & citra Indonesia sebagai *middle power* terutama di kawasan Indo-Pasifik.
3. Mempromosikan gagasan-gagasan orisinal dalam kerjasama multilateral untuk memaksimalkan kontribusi Indonesia pada penyelesaian masalah global.
4. Memperkuat infrastruktur diplomasi digital yang handal.
5. Mengedepankan strategi *green recovery* dalam mencapai pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
6. Mendorong pemerintah untuk berkontribusi dalam proses penyelesaian konflik antara Ukraina dan Rusia dengan mengedepankan prinsip perdamaian dan kemanusiaan diatas kepentingan ekonomi.

#### **H. Komisi Perlindungan Sosial dan Kebudayaan**

Fokus utama rekomendasi yang disusun oleh Komisi Perlindungan Sosial dan Kebudayaan adalah upaya pemulihan pembangunan di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil kajian pengurus komisi dan kontributor eksternal yang ditulis dalam beberapa bentuk publikasi, di antaranya adalah buku *Indonesia's Post-Pandemic Outlook Series: Social Perspectives*, artikel daring, kajian akademis, dan *policy brief*. Kajian yang dilakukan Komisi Perlindungan Sosial dan Kebudayaan merujuk kepada *UN Research Roadmap for the COVID-19 Recovery*. Kajian Komisi Perlindungan Sosial dan Kebudayaan juga didasari oleh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dan prinsip keadilan sosial yang merupakan bagian dari Pancasila yang merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:**

1. Pemulihan pembangunan pasca pandemi COVID-19 tidak dapat dilakukan dengan pendekatan silo, namun harus menggunakannya pendekatan yang holistik. COVID-19 tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga masalah sosial dan ekonomi yang memiliki efek domino dan saling memengaruhi satu sama lain. Kunci utama dari pengananan holistik ini



adalah kerjasama antar lembaga negara untuk sinkronisasi data masyarakat terdampak, penguatan infrastruktur sosial dan ekonomi untuk memperkuat resiliensi masyarakat, serta peningkatan edukasi masyarakat dalam menangani dampak-dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan sehari-hari.

2. Pemerataan dukungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat selama masa pemulihan pembangunan pasca pandemi COVID-19 harus terus ditingkatkan. Pemulihan kelompok rentan, seperti masyarakat kumuh perkotaan yang terdampak parah akibat pandemi, tidak dapat diabaikan. Selain itu, peningkatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat juga penting untuk mengatasi krisis di masa depan.
3. Instrumen hukum yang baru-baru ini diberlakukan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual, di masa krisis harus diimplementasikan secara optimal, terutama diterjemahkan ke dalam rencana aksi yang konkret. Langkah-langkah ini juga harus mengintegrasikan kolaborasi dengan aktor-aktor strategis seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan menempatkan fokus tidak hanya pada respon tetapi juga pada protokol pencegahan dan mitigasi yang mengikat secara hukum baik di tingkat lokal maupun nasional.
4. Kebijakan pemulihan pembangunan pasca pandemi COVID-19 harus sensitif gender untuk mencegah terjadinya peningkatan ketidaksetaraan gender. Instrumen pengarusutamaan gender harus terus digemakan di setiap lembaga dan institusi pemerintah dan masyarakat. Proses penyusunan kebijakan harus mempertimbangkan akses dan kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan adil dan setara.
5. Dalam isu pekerja migran, Undang-Undang dan peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak pekerja migran pada seluruh fase dan tahap migrasi—yang meliputi persiapan keberangkatan, selama penempatan, dan pasca-migrasi—perlu ditinjau ulang. Perlindungan pekerja migran harus berdasarkan dan memenuhi hak-hak yang sesuai dengan norma, standar dan kerangka internasional, seperti salah satunya *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* (GCM). Selain itu, upaya penguatan mekanisme multilateral, regional dan bilateral dalam proses pemenuhan hak-hak pekerja migran harus dilakukan yang dilengkapi dengan upaya membangun kapasitas atase ketenagakerjaan pada setiap kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) yang mempunyai pengalaman secara langsung dan memiliki prinsip dan paradigma intervensi berbasis hak asasi manusia (HAM), alih-alih prosedural dan institusional.
6. Isu dan permasalahan terkait penyandang disabilitas di Indonesia harus dimaknai secara holistik dan dalam kerangka pemenuhan HAM. Pra-kondisi utama yang harus dipenuhi adalah ketersediaan data yang akurat, presisi, dan terdisagregat terkait penyandang disabilitas dengan kolaborasi intens dengan berbagai pemangku kebijakan khususnya organisasi dan kelompok penyandang disabilitas di tingkat lokal. Pemerintah harus mengatasi kendala perbedaan sumber hingga metode pengambilan data yang terjadi di



berbagai lembaga, agar selanjutnya data tersebut dapat menjadi dasar komperhensif dalam berbagai aktivitas dan program untuk pemenuhan HAM para penyandang disabilitas. Secara linear, pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusianya dengan pemahaman yang mendalam berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan inklusif disabilitas, serta pemahaman agar dapat lebih mampu untuk menjadi 'pendengar' yang simpatik dan tidak berjarak terhadap kelompok penyandang disabilitas.

7. Pandemi COVID-19 semakin menyingkap bagaimana nasib getir seniman tradisional. Pra COVID-19, seniman tradisional harus tunggang-langgang menyamakan diri dengan seniman modern, baik dari segi metode ataupun pengemasan *output* pertunjukan. Pemerintah tentu turun tangan mendongkrak finansial para seniman, namun pendataan menjadi kendala bagi beberapa kelompok seniman. Oleh karena itu, sertifikasi seniman menjadi hal yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah; manfaatnya bukan hanya terbantunya pendataan, namun juga menjadi semacam 'KTP' yang dapat menunjukkan kemampuan seniman baik otodidak maupun profesional. Sertifikasi seniman memberi perlindungan sosial bagi para seniman, antara lain membangun kredibilitas seniman, meningkatkan potensi penghasilan serta meningkatkan efisiensi kemampuan.
8. Politik identitas dan radikalisme masih menjadi bahaya laten yang bisa merusak persatuan dan kesatuan kita, untuk melawannya perlu adanya kebijakan yang tegas kepada setiap penyebar kebencian yang tidak berstandar ganda dan perlu adanya edukasi yang melibatkan dialog mengenal yang lain dengan melibatkan lebih banyak generasi muda. Radikalisme jangan hanya di atasi oleh pendekatan militeristik dan jangan dijadikan stigma kepada mereka yang berbeda, tapi radikalisme harus dipahami secara ilmiah tanpa terlepas dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang menyertainya. Perlu adanya dakwah dan penafsiran yang berbasis kedamaian tanpa menjadi ekstrim kiri maupun kanan, serta perlu adanya pengecekan terhadap pendanaan berbasis agama yang tidak transparan. Bersamaan dengan ini, peneliti maupun pakar etika Indonesia dapat lebih memperdalam harmonisasi prinsip-prinsip sebuah aksi dengan faktual lapangan, demi memperkecil stereotip terhadap beberapa golongan.
9. Menindaklanjuti hasil diseminasi *policy brief* yang berjudul Menuju Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual di Indonesia bersama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), PPI Dunia periode 2022-2023 dapat melakukan survei dan kajian awal tentang kekerasan seksual terhadap pelajar Indonesia di luar negeri sebagai langkah untuk memberikan perlindungan terhadap pelajar Indonesia di luar negeri dari kekerasan seksual.

Demikian rekomendasi dari Komisi Perlindungan Sosial dan Kebudayaan Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia 2021-2022. Rekomendasi ini disusun dengan semangat untuk mendorong upaya pemulihan pembangunan Indonesia pasca pandemi COVID-19 yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

## I. Komisi Lingkungan Hidup

Aspek utama dari rekomendasi yang disusun oleh Komisi Lingkungan Hidup 2021-2022 berdasarkan *Research and Strategic Input Policy Development* untuk mendorong pemikiran dalam konteks pendekatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta dalam upaya percepatan penanganan *pasca coronavirus disease* (COVID-19). Hal tersebut tertuang dalam: (1) buku Indonesia *Post-Pandemic Outlook Series: Environment and Technology Role for Indonesian Development*, (2) *Policy Brief: Perhutanan Sosial untuk Mendukung Perjanjian Mengakhiri Deforestasi Hutan pada 2030*, (3) Artikel Imiah: (a) *Corporate Sustainability for Indonesia's Sustainable Society*, (b) *Prospect and Challenges of Ripple Spreading Algorithm for Waste Collection Path Optimization Problem in Indonesia*; (4) *Climate Change We Pledge 2.0* yang berfokus mengenai isu lingkungan hidup dan krisis iklim yang ditujukan bagi kaum muda Indonesia, (5) Audiensi dan Studi banding antara Komisi Lingkungan Hidup dengan: Yayasan Sajogyo Inti Utama, The Climate Reality Project Indonesia, Greenpeace Indonesia, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), dan IMTLI (Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia).

### **Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:**

1. Merujuk dari kajian *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050 yang dipublikasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masalah lingkungan kini bertumpu pada minimisasi emisi. Sehingga, perlu adanya peningkatan dalam pemahaman sektoral dan akademis dalam menangani permasalahan secara tepat, liner dengan target nasional, serta memperluas kesempatan partisipasi seluruh masyarakat. Berdasarkan fenomena pandemi COVID-19 yang melanda dunia, kami merasa situasi ini dapat menjadi awal baru bagi Indonesia untuk mengembangkan dan melakukan transformasi dalam garis-garis yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yaitu lingkungan di Bumi dan teknologi.
2. Dalam upaya mengakhiri deforestasi hutan di Indonesia dengan beragam tipe ekosistem, maka diperlukan pendekatan strategis yang melibatkan masyarakat adat, baik dari sudut pandang institusional dan kebijakan, sebagai berikut: (a) Pembangunan kapasitas untuk institusi lokal, (b) Proses yang inklusif dan demokratis secara birokratis dan finansial, dan (c) Implementasi misi, metode, dan evaluasi pengereman deforestasi dalam Perhutanan Sosial. Selain itu, target-target konservasi hutan, termasuk target nol deforestasi, perlu direalisasikan dalam metode penilaian efektivitas kebijakan Perhutanan Sosial. Penerapan evaluasi ini perlu diterapkan dengan kondisi ekologis tiap wilayah, serta diintegrasikan menjadi indikator yang dilaporkan di tingkat nasional.
3. Sustainable Development Goals 2030 merupakan visi transformasional dengan tagline *no one is left behind* dan menjamin manfaat penuh bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karenanya diharapkan adanya (a) informasi untuk perusahaan dan masyarakat dalam prinsip keberlanjutan khususnya terkait sustainability and carbon management hierarchy, (b)

- Dengan kemajuan teknologi yang meningkat, hal ini bisa dijadikan salah satu solusi dalam optimasi jalur pengumpulan sampah melalui *evolutionary computation (EC)*.
4. Perubahan iklim merupakan krisis global yang saat ini terjadi menjadi faktor pendorong terjadinya degradasi lingkungan, bencana alam, cuaca ekstrem, krisis air dan pangan, disrupsi ekonomi, hingga konflik. Dalam mengatasi krisis iklim secara kolektif dan berkelanjutan, diperlukan peran pemuda sebagai kunci dalam mitigasi yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai generasi penerus. Berikut beberapa rekomendasi tema utama yang dapat dijadikan acuan: *Indonesian Towards Green Finance, Opportunity Feasibility of Renewable Energy Indonesia, Moving Towards Green Finance: A Global and A Local Perspective, Climate Assessment Practices and Future Possibilities*.
  5. Berdasarkan prinsip kolaboratif 'partnership for the goals' diharapkan kedepannya lebih banyak kolaborasi dengan berbagai pihak secara meluas. Kolaborasi juga diharapkan berfokus dari *pentahelix five actors (academics, business, community, government, and media)* yang berfokus untuk menangani kondisi lapangan, kebijakan dan isu-isu lingkungan hidup di Indonesia yang ada saat ini.

Dalam rekomendasi tersebut salah satu instrumen penting untuk ditindaklanjuti adalah peningkatan dalam penanganan pandemi, deforestasi hutan, dan krisis iklim khususnya dari aspek sektoral dan akademis meliputi seluruh aspek baik ditujukan pada pemerintah maupun masyarakat sipil. Selanjutnya diperlukan, wadah, dan dukungan untuk masyarakat khususnya anak muda untuk bisa berpartisipasi aktif dalam menangani krisis iklim serta tantangan kedepannya. Rekomendasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan aspek kolaborasi dari berbagai pihak.

## **J. Komisi Energi**

Energi adalah penggerak aktivitas manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa energi merupakan salah satu kebutuhan esensial. Komisi energi sebagai bagian dari Direktorat Penelitian dan Kajian PPI Dunia melalui kegiatannya selama satu tahun ini di kabinet PPI Dunia 2021-2022, dengan ini menyampaikan poin-poin rekomendasi kami terhadap iklim pasar energi Indonesia pada saat ini dan untuk yang akan datang. Rekomendasi kami merupakan rangkaian aksi strategis yang perlu diperhatikan untuk mencapai target *net-zero carbon emission*. Oleh karena itu, rekomendasi ini tidak hanya melingkupi aspek produksi energi, namun juga rehabilitasi lingkungan hidup sebagai salah satu aset alami penyerap emisi karbon. Rekomendasi ini disusun dari sudut pandang energi terbarukan dengan mempertimbangkan komitmen Indonesia untuk mencapai angka *net-zero* emisi karbon di tahun 2060 yang telah disampaikan pada pertemuan COP26 lalu di Glasgow, Britania Raya. Rekomendasi disusun berdasarkan rangkuman luaran kegiatan komisi energi selama setahun belakangan yaitu penulisan buku, penulisan artikel ilmiah dan artikel populer, diseminasi dokumen *policy brief*, hingga webinar energi terbarukan.



## Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

Rekomendasi terbagi menjadi dua kategori utama, yang pertama mengenai implementasi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi Indonesia dan yang kedua mengenai rangkuman aksistrategis untuk mencapai *net-zero* emisi karbon.

1. Rekomendasi implementasi energi baru dan terbarukan.  
Peningkatan investasi, subsidi, dan Iklim Pasar: Diperlukan kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan menciptakan sektor yang kondusif untuk perkembangan pasar energi. Contohnya adalah dengan meningkatkan investasi dan subsidi untuk EBT, kemudahan beraktivitas untuk pelaku usaha baru, dan investasi di bidang penelitian dan pengembangan teknologi EBT.
2. Rekomendasi strategi/aksi menuju net-zero emisi karbon:
  - 2.a Peningkatan investasi untuk teknologi carbon capture dan carbon offset (Bio-CCUS), utamanya pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal ini dapat dimulai dari PLTU yang dioperasikan oleh BUMN mengingat sebagian besar porsi pembangkit saat ini dikelola oleh perusahaan negara.
  - 2.b Reforestasi serta restorasi area hijau di kawasan urban. Area hijau ini penting untuk menjadi carbon sink, tempat bernaung, dan kegiatan rekreasi publik. Penambahan area hijau diharapkan mampu memperbaiki taraf hidup warga sekitar serta mengurangi polusi udara di daerah urban dengan hadirnya pohon-pohon sebagai penyerap karbon alami.
  - 2.c Penguatan serta penyetaraan akses ke infrastruktur yang ramah transportasi publik. Hal ini penting untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor sebagai sumber emisi karbon. Saat ini akses infrastruktur untuk transportasi publik belum merata di seluruh wilayah NKRI mengingat masih terpusatnya perkembangan di wilayah ibukota.
  - 2.d Perlindungan lingkungan dan biodiversitas di tengah ancaman krisis iklim (kebaran hutan, banjir, kenaikan temperatur laut, dsb.). Runtuhnya biodiversitas memiliki efek domino yang akan berakibat buruk terhadap rantai suplai makanan dan keberlangsungan manusia secara signifikan.
  - 2.e Pengembangan kebijakan yang memberi insentif industri rendah karbon dan menerapkan pajak karbon untuk sektor manufaktur. Insentif diharapkan mampu untuk menarik perusahaan dengan jejak karbon tinggi agar melakukan optimasi proses menuju perusahaan rendah emisi. Sebaliknya, penerapan pajak karbon diharapkan mampu menahan laju perkembangan industri dan kegiatan yang tinggi emisi karbon.
  - 2.f Penyederhanaan proses investasi dan birokrasi terhadap proyek-proyek EBT. Preferensi pemerintah untuk proyek EBT akan jelas terlihat melalui penyederhanaan birokrasi dan penambahan investasi di bidang ini jika dibandingkan dengan proyek energi fosil yang seharusnya mulai diberhentikan demi mengejar net-zero emisi karbon.
  - 2.g Pengaturan harga antara EBT dan energi konvensional di pasar energi untuk menjaga tingkat kompetisi EBT dan layanan. Mengingat karakteristik masyarakat yang masih sangat sensitif dengan perubahan tarif energi, agar EBT dapat bersaing diperlukan regulasi di pasar mengenai tarif sehingga EBT lebih kompetitif dan dapat diandalkan dibandingkan energi fosil.





- 2.h Edukasi publik tentang pentingnya transisi dan aktivitas carbon offset individu. Untuk saat ini, tingkat edukasi masyarakat mengenai pentingnya transisi energi dan target net-zero emisi masih sangat rendah. Edukasi masyarakat akan mampu membantu tingkat kompetitif EBT serta mendorong masyarakat untuk menjalankan kesehariannya dengan memilih alternatif yang paling rendah jejak karbon.

Target pemerintah untuk mencapai *net-zero* emisi karbon bukanlah hal yang tidak mungkin. Namun, mengingat kondisi saat ini serta kebutuhan yang akan datang, diperlukan kontribusi berbagai-pihak serta percepatan aplikasi teknologi pendukung untuk mencapai target-target tersebut dalam jangka waktu yang diharapkan. Melalui rekomendasi ini, kami berharap penuh agar transisi bauran energi ke sumber energi terbarukan dapat tercapai demi pemenuhan salah satu hak dasar manusia untuk hidup di lingkungan yang layak. Hal tersebut terkait erat dengan keberhasilan Indonesia, serta negara-negara dunia untuk menahan laju perubahan iklim melalui penurunan emisi karbon secara signifikan. Demikian rekomendasi ini kami sampaikan dengan harapan rekomendasi ini mampu menakar secara tepat problematika iklim industri energi Indonesia serta langkah penting yang dapat diambil untuk mengatasinya.

#### **K. Komisi Teknologi, Informasi dan Komunikas Publik**

Pandemi Covid-19 yang belum usai telah menjadi faktor pemaksa percepatan pemanfaatan teknologi digital pada berbagai aktifitas kehidupan. Dengan bantuan teknologi banyak aktifitas dapat dilakukan secara jarak jauh dan efisien. Berdasarkan kegiatan selama setahun kepengurusan, berupa kajian internal, diskusi dengan para pakar, penulisan buku, dan *policy brief*, maka kami dari Komisi Teknologi merangkum hal-hal berikut sebagai rekomendasi dalam rangka transformasi digital untuk Indonesia yang lebih baik:

1. Penerapan sistem transportasi terintegrasi dengan data yang terpusat untuk percepatan perwujudan transportasi publik yang inklusif, efisien, dan ramah lingkungan.
2. Krisis pangan sebagai salah satu dampak dari pandemic Covid-19 dapat diantisipasi dengan menyeimbangkan stok pangan dalam negeri. Ini dapat mencegah terjadinya kenaikan harga-harga bahan pangan jika permintaan lebih tinggi dari stok pangan yang ada. Hal ini dapat diantisipasi dengan adanya sistem informasi monitoring pasokan dan permintaan pangan berbasis teknologi data berupa smart food supply chain.
3. Komisi Teknologi mengusulkan percepatan pengaplikasian sistem informasi terintegrasi rumah sakit berupa Hospital Information System (HIS) dan Electronic Health Record (EHR).
4. Komisi Teknologi mendorong Pemerintah Indonesia segera merealisasikan integrasi data, penyelarasan proses, dan persiapan sumber daya manusia melalui kebijakan "satu data".
5. Kehandalan dan kevalidan ilmu tersebut tidak cukup belajar dari internet tanpa adanya pendamping, untuk mengatasi hal ini kami merekomendasikan

pembangunan knowledge management system untuk mendukung sistem pembelajaran di Indonesia.

6. Penerapan teknologi blockchain dapat mempermudah Pemerintah atau para pembuat kebijakan dalam mendisain kebijakan publik. Selain itu, blockchain memiliki enkripsi keamanan data yang rumit sehingga dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Komisi merekomendasikan pendekatan triple helix dari pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk disain dan penerapan teknologi blockchain tersebut.

Demikian rekomendasi yang kami susun dari buah pemikiran para pelajar yang tergabung dalam Komisi Teknologi dan telah disepakati bersama oleh perwakilan PPI Negara dalam Sidang Komisi pada Simposium Internasional XIV PPI Dunia. Kami berharap rekomendasi ini dapat menjadi pertimbangan Pemerintah dalam mempercepat pemulihan Indonesia menuju Indonesia maju dan sejahtera.